

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1 Partisipasi

Partisipasi sebenarnya adalah merupakan istilah dalam bidang manajemen, namun saat ini telah lebih berkembang luas bukan monopoli ilmu manajemen saja, dalam artian istilah partisipasi itu sudah umum dan dalam arti yang luas, istilah ini sebenarnya diambil dari bahasa asing “participation”, yang artinya mengikut sertakan pihak lain. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan jahiriah.

Pengertian partisipasi adalah masyarakat berperan aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau bentuk penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat sering kali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat sulit diajak maju oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga di sebabkan sudah adanya campur tangan dari pihak penguasa.

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian itu selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.

Bornby (1974) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 1983). Beal (1964) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*).

Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah, semakin mantapnya jaringan sosial (*social network*) yang “baru” yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial yang baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Sebagai suatu kegiatan, Verhange (1979) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian : Kewenangan, tanggung jawab dan manfaat.

2.1.1 Partisipasi Masyarakat

Menurut Adisasmita (2006:18) partisipasi masyarakat dapat di definisikan sebagai ketertiban dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan,

meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebut pun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat mempersetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal.

Sejumlah pakar memberikan batasan tentang konsep partisipasi, diantaranya Mubyarto (2000 : 54) yang membatasi partisipasi sebagai kesadaran untuk membuat berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. Pra syarat untuk munculnya partisipasi adalah adanya rasa tanggung jawab dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasinya.

Pengertian partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dengan pengertian itu seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. (Taliziduhu Ndraha, 2008 : 18).

Gaventa dan Valderama (dalam Arsito, 2004 : 45), mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokrasi, yaitu:

1. Partisipasi Politik, *Political Participation* lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi Sosial, *Social Participation* ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi dan pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses partisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

3. Partisipasi Warga, *Citizen Participation* menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap ‘penerimaan derma’ atau ‘kaum tersisih’ menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka”.

Menurut Dusseldorp yang dikutip oleh Miriam Budihardjo (dalam Syaprizal, 2007 : 30) mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat adalah dengan melihat bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dalam perumusan tujuan sampai tahap penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya *public policy* mempengaruhi demokrasi sehingga berkualitas dari hirarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan mau kefasihan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat bersangkutan.

2.1.2 Bentuk dan Tipe Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Hamijoyo (dalam Abu Huraerah, 2007:21) dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebut diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bentuk :

1. Partisipasi diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) bentuk partisipasi nyata misalnya, uang, benda, tenaga dan keterampilan .
2. Partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata. Bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi berupa buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan.

Menurut Notoatmodjo (2007 : 98), di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat di wujudkan dalam 4 M, yakni :

1. Manpower (tenaga)

Bantuan tenaga yang diberikan seperti turut serta dalam proses kegiatan pelaksanaan, gotong royong, melakukan pemadaman kebakaran bersama, dsb.

2. Money (uang)

Bantuan yang bersifat swadaya masyarakat yang nantinya akan di gunakan untuk medanai poses pemadaman kebakaran hutan yang akan dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Material (benda-benda)

Peranan masyarakat berupa bantuan logistik dan perlengkapan dalam proses pemadaman kebakaran seperti, menyediakan selang, dan hal terkecil yaitu ember.

4. Mind (ide)

Ide atau gagasan yang diberikan disaat musyawarah yang nantinya akan dijadikan ide pokok dalam perencanaan penanganan kebakaran maupun pemadaman kebakaran.

2.1.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox (1988) mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu :

1. Memberikan Informasi (*Information*)
2. Konsultasi (*consultation*), yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama (*Deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
4. Bertindak bersama (*Acting together*), dalam arti sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Memberikan dukungan (*Supporting independent community interest*) di mana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Notoadmodjo (2007: 100), ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi, adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sosial ekonomi

Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkatan pendapatan, tingkatan pendidikan.

2. Faktor Politik

Peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi :

- a. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. (Dan Nimmo 2000:8).

- b. Kesadaran Politik

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan pembangunan. Menurut (Miriam Budihardjo 1985:119).

3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan fisik individu, jenis kelamin, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok.

4. Faktor Nilai dan Budaya

Nilai budaya politik atau *silvic culture* merupakan bisnis yang membentuk demokrasi, pada hakikatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau peradaban masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap dan kepercayaan politik.

Menurut Plumer (dalam suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikut proses partisipasi adalah :

1. Pengetahuan dan Keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.
2. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikit waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

3. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
4. Jenis Kelamin. Sudah dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.
5. Kepercayaan terhadap kebudayaan tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

2.1.5 Prinsip-Prinsip Partisipasi

UNDP (*United Nations Development Programme*) seperti yang dikutip oleh lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai pelaku dalam *Good Governance* yaitu Negara atau pemerintah, *private sektor* atau swasta dan *civil society* atau masyarakat. Setiap perilaku tersebut memiliki peran masing-masing demi terbentuknya *good governance*. Secara umum pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif sedangkan *private sektor* memiliki peran untuk

menggerakkan dunia usaha sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sementara masyarakat civil berperan untuk memfasilitasi interaksi-interaksi sosial politik dan mobilisasi kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan prinsip-prinsipnya menurut UNDP seperti yang dikutip oleh Syamsuddin Haris (2007 : 57-59) adalah sebagai berikut.

1. *Participan*, setiap warga Negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung maupun mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. *Rule of law*, aturan hukum, keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat dilakukan secara hukum.
3. *Transparency*, yaitu kebebasan arus informasi, dapat diketahui, di monitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga pemerintah.
4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga pemerintah harus tanggap, responsive terhadap kepentingan stackholder-nya.
5. *Consensus orientation*, berorientasi pada kesepakatan yaitu bisa menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda sebagai cara mencari alternative terbaik dan membela kepentingan pihak yang lebih luas.
6. *Equity*, kesetaraan, semua warga Negara baik, laki-laki maupun perempuan tanpa memandang status, miskin, kaya, memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan persamaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. *Effectiveness and efficiency*, setiap proses kegiatan, aktifitas lembaga pemerintah dapat menyesuaikan tugasnya sesuai dengan garis yang sudah diterapkan.
8. *Accountabellity*, para pembuat keputusan dalam pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab pada publik dan lembaga *stakeholdernya*.
9. *Strategic Vision*, visi strategis, para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif *good governance* dan pengembangan SDM yang luas dan jauh ke depan sesuai dengan keperluan pembangunan.

2.2 Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa arab yang *musyarak* yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi berkumpul bersama, hidup bersama, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, menurut Ralf Linton (dalam Abdul Syani, 2002 : 31) masyarakat adalah sekelompok manusia yang yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dengan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Sedangkan ciri-ciri masyarakat yang hidup bersama adalah sebagai berikut :

- a. Bercampur untuk waktu lama
- b. Mereka sadar bahwa mereka adalah kesatuan
- c. Mereka merupakan satu sistem hidup bersama

Menurut Harold J. Laski (dalam Budiarjo, 2004 : 34), masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan berkerja sama untuk mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkabulnya keinginan bersama, yang mana mereka hidup satu wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka dan ditaati oleh setiap orang, sehingga mereka hidup dalam keadaan yang terjaga keamanannya. Dari apa yang dikemukakan oleh Harold J. Laski dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan manusia, agar terjaga dan terpelihara dari ancaman-ancaman yang merusak dan kerukunan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya aturan (hukum), manusia merasa takut untuk mengganggu dan berbuat jahat kepada orang lain.

Harold Lasswell (dalam budiarjo, 2004), mengamati kehidupan masyarakat sekelilingnya, yaitu masyarakat memperinci delapan nilai yang diinginkan, yaitu :

- (1) kekuasaan, (2) pendidikan/penerangan, (3) kekayaan, (4) kesehatan, (5) keterampilan, (6) kasih sayang, (7) kejujuran, (8) keseganan.

2.2 Hutan

Hutan adalah salah satu ekosistem yang sangat penting bagi bumi ini. Pemanasan global yang terjadi akhir-akhir ini adalah implikasi dari adanya deforestasi dan degradasi hutan. Pengertian hutan sangat beragam, bergantung pada sudut pandang kita mendefinisikan hutan. Dalam tulisan ini kami akan membahas pengertian hutan dari perspektif penekanan pada konsep ekologi, tujuan tertentu, dan status hukum lahan yang menjadi tempat tumbuh hutan menurut undang-undang.

Menurut Sharma (1992), *“Forest is a plant community predominantly of trees and other woody vegetation, growing more or less closely together.”* “Hutan adalah suatu komunitas tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lain, tumbuh secara bersama-sama dan cukup rapat.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pengertian berbeda dan lebih rinci disampaikan oleh Helms (1998),

“Forest in an ecosystem characterized by a more or less dense and extensive tree cover, often consisting of stands varying in characteristics such as species composition, structure, age class, and associated processes, and commonly including meadows, stream, fish, and wildlife. Forest include special kinds such as: industrial forests, non industrial private forests, plantations, public forests, protection forests, and urban forests.” “Hutan adalah ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon-pohon yang cukup rapat dan luas, seringkali terdiri atas tegakan-tegakan yang beranekaragam sifat, seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan proses-proses yang berhubungan; pada umumnya mencakup: padang rumput, sungai, ikan, dan satwa liar. Hutan mencakup pula bentuk khusus, seperti hutan industri, hutan milik non-industri, hutan tanaman, hutan publik, hutan lindung, dan hutan kota.”

Berdasarkan Departemen Kehutana pada tahun 1989, hutan adalah suatu ekosistem yang bercirikan liputan pohon yang cukup luas, baik yang lebat atau kurang lebat.

2.3 Lahan

Sejak tahun 1970, istilah lahan mulai banyak digunakan. Menurut FAO, lahan diartikan sebagai tempat di permukaan bumi yang sifat-sifatnya layak disebut seimbang dan saling berkaitan satu sama lain, memiliki atribut mulai dari biosfer atmosfer, batuan induk, bentuk-bentuk lahan, tanah dan ekologi, hidrologi, tumbuh-tumbuhan, hewan dan hasil dari aktivitas manusia pada masa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu dan sekarang yang menegaskan bahwa variabel itu berpengaruh nyata pada penggunaan manusia saat ini dan akan datang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah lahan berarti tanah terbuka, tanah garapan. Lahan diartikan sebagai suatu tempat terbuka di permukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk lahan pertanian, untuk membangun rumah, dan lain-lain.

Pemahaman tentang tipe-tipe tanah yang penting bagi pemanfaatan dan daya guna lahan. Tidak semua tipe tanah bisa dipakai untuk lahan pertanian, untuk membangun rumah, berdirinya pabrik, atau alas jalan. Setiap tanah memiliki karakteristiknya sendiri yang memberi pengaruh pada terbatasnya daya guna lahan di atas tanah itu. Sebelum pemanfaatan lahan di atas tanah, harus melakukan survey tanah terlebih dahulu.

Pendayagunaan tanah sebagai sumber daya tidak hanya sebatas tanah dalam batas yang sempit, tetapi lebih luas berupa lahan. Lahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, tumbuhan, dan makhluk lainnya. Manusia selalu berusaha memiliki dan menguasai lahan, yang ikut menentukan status sosialnya. Kebutuhan hidup manusia yang beragam, penguasaan teknologi, kondisi sosial budaya, dan ekonomi masyarakat yang berbeda merupakan faktor yang menentukan dalam penggunaan lahan. Pengelolaan lahan merupakan upaya yang dilakukan manusia dalam pemanfaatan lahan sehingga produktivitas lahan tetap tinggi secara berkelanjutan (jangka panjang).

Penggunaan sumber daya lahan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok manfaat dan peranan, yaitu (M. Ardi, dkk : 274) :

- a. Lahan digunakan untuk tempat tinggal, berusaha, bercocok tanam, dan tambak ikan.
- b. Lahan sebagai kawasan hutan yang menopang kehidupan vegetasi satwa liar.
- c. Lahan sebagai daerah pertambangan yang bermanfaat bagi manusia.

Istilah lahan digunakan berkenaan dengan permukaan bumi beserta segenap karakteristik-karakteristik yang ada padanya dan penting bagi perikehidupan manusia (Christian dan Stewart, 1968). Secara lebih rinci, istilah *lahan atau land* dapat didefinisikan sebagai *suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa mendatang* (Brinkman dan Smyth, 1973; dan FAO, 1976). Lahan dapat dipandang sebagai suatu *sistem* yang tersusun atas (i) komponen struktural yang sering disebut *karakteristik lahan*, dan (ii) komponen fungsional yang sering disebut *kualitas lahan*. Kualitas lahan ini pada hakekatnya merupakan sekelompok unsur-unsur lahan (*complex attributes*) yang menentukan tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan (FAO, 1976).

Lahan sebagai suatu "sistem" mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran tertentu. Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai *sumberdaya* dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidupnya. Sys (1985) mengemukakan enam kelompok besar sumberdaya lahan yang paling penting bagi pertanian, yaitu (i) iklim, (ii) relief dan formasi geologis, (iii) tanah, (iv) air, (v) vegetasi, dan (vi) anasir artifisial (buatan). Dalam konteks pendekatan sistem untuk memecahkan permasalahan-permasalahan lahan, setiap komponen lahan atau sumberdaya lahan tersebut di atas dapat dipandang sebagai suatu *subsistem* tersendiri yang merupakan bagian dari sistem lahan. Selanjutnya setiap subsistem ini tersusun atas banyak bagian-bagiannya atau karakteristik-karakteristiknya yang bersifat dinamis (Soemarno, 1990). Dari beberapa pengertian tentang lahan maka dapat disimpulkan bahwa Lahan merupakan lingkungan fisik yang meliputi iklim, relief, tanah, hidrologi, dan vegetasi. Faktor-faktor ini hingga batas tertentu mempengaruhi potensi dan kemampuan lahan untuk mendukung suatu tipe penggunaan tertentu.

Tipe penggunaan lahan ("*major kind of land use*") adalah golongan utama dari penggunaan lahan pedesaan, seperti lahan pertanian tadah hujan, lahan pertanian irigasi, lahan hutan, atau lahan untuk rekreasi. Tipe pemanfaatan lahan ("*land utilization type, LUT*") adalah suatu macam penggunaan lahan yang didefinisikan secara lebih rinci dan detail dibandingkan dengan tipe penggunaan lahan. Suatu LUT terdiri atas seperangkat spesifikasi teknis dalam konteks tatanan fisik, ekonomi dan sosial yang tertentu.

2.5 Partisipasi masyarakat dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Guna penanganan kebakaran hutan dan lahan areal pertanian masyarakat pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mendorong peran atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

partisipasi masyarakat sebagai salah satu upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) pada setiap Kecamatan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menjadi penyebab utama terjadinya kabut asap di sekitar daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari Peraturan Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P. 2/IV-SET/2014 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api, mengatakan masyarakat peduli api yang selanjutnya disebut MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih/diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu mengendalikan hutan.

Adapun tugas masyarakat peduli api menurut Peraturan Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P. 2/IV-SET/2014 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kepada personal atau unit atau kesatuan pengelolaan hutan terkait kejadian kebakaran dan atau pelaku kebakaran.
- b. Menyebarkan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan.
- c. Melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama-sama dengan petugas unit atau kesatuan pengelolaan hutan.
- d. Melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka penguatan kelembagaan.

Menurut Sunanto (2008) Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah suatu organisasi kelompok masyarakat yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam hal pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peduli api berada dibawah kendali pihak kecamatan dan merupakan unit pelaksana yang berada ditingkat desa.

Adapun tugas dan kegiatan masyarakat peduli api menurut sunanto yaitu,

Kegiatan Pra Kebakaran atau Pencegahan :

1. Membantu SATLAKDALKARHUTLA kecamatan dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di desa/Kelurahan tentang pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
2. Mengadakan pengawasan dan pemantauan terhadap hutan dan lahan di Desa/Kelurahan masing-masing pada musim kemarau.

Kegiatan saat terjadi kebakaran hutan, meliputi kegiatan – kegiatan :

1. Melaporkan kepada SATLAKDALKARHUTLA kecamatan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, baik yang sudah dapat di tanggulangi maupun yang belum ditanggulangi.
2. Melakukan penanganan kebakaran apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan kecil maupun besar.

Kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan, meliputi kegiatan – kegiatan

1. Mengadakan pendataan lahan yang akan dilakukan pembakaran dan memantau seta memerintahkan kepada pemilik lahan untuk menjaga selama pembakaran berlangsung.
2. Membuat kesepakatan Desa/adat dan sanksi-sanksinya kepada pelaku pembakaran yang tidak mengindahkan kesepakatan bersama yang telah ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan diperlukan adanya partisipasi masyarakat sekitar hutan dan lahan terutama pada daerah-daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Upaya melibatkan masyarakat secara aktif merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

2.6 Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Peranan menurut Soekanto (2001:213) adalah: “Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan nya maka ia menjalankan suatu peranan”.

Menurut Soekanto (2001:213) mencakup sedikit tiga pengertian:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veitzal (2004:148) Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur atau diharapkan dari seseorang dalam kondisi tertentu. Peranan pemerintah desa dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya sebagai pemerintah desa.

Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antara individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Veitzal Rivai, 2004:53). Secara operasional fungsi pemerintah dan dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Instruksi

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dikerjakan secara efektif.

2. Fungsi Partisipatif

Dalam menjalankan fungsi pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakat, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

3. Fungsi delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik meliputi persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah, fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. (Taliziduhu Ndraha, 2008:18)

Untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penanganan kebakaran hutan dan lahan, masyarakat haruslah diberikan informasi tentang arti pentingnya dalam penanganan kebakaran hutan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lahan melalui kegiatan komunikasi, adaptasi, kerjasama yang nantinya masyarakat akan mengerti dan memahami hakikat pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

2.7 Penelitian Terdahulu

1. Sunanto, Tesis, Universitas Diponegoro, 2008 “Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan” Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran serta masyarakat dan kelompok peduli api dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan mengapa di kecamatan ransau jaya sampai dengan saat ini masih terjadi kebakaran. Hasil penelitian tersebut saat ini masih belum berjalan dengan baik, karna kelompok peduli api masih bersifat formalitas dan cenderung hanya untuk memenuhi instruksi sehingga masih belum melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.
2. Andriyas Syaputra, Skripsi, Uin Suska Riau, 2014 “Analisis Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan dan Lahan Diprovinsi Riau (Studi Kasus Kabupaten Rokan Hulu)” Fokus penelitian adalah Bagaimana peran pemerintah khususnya pemerintah rokan hulu dalam penanggulangan kerusakan hutan dan lahan serta faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan dan lahan tersebut. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasannya peran pemerintah kabupaten rohul dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kurang maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Mariono Yenni Chistanti Marbun, Skripsi USU, 2013 “Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam upaya Penanggulangan bencana banjir di kota Medan” Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya peranan koordinasi badan penanggulangan bencana kota medan belum melakukan koordinasi sesuai dengan tupoksi.

2.8 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi aspek penelitian dan penilaiannya, karena penelitian ini lebih cenderung membahas dan mengulas tentang partisipasi masyarakat dalam penanganan Kebakaran Hutan dan lahan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti melalui upaya-upaya yang dilakukan. Kemudian disamping dari mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Penelitian juga mencari tau dan menganalisis Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tebing tinggi timur Kabupaten di kabupaten kepulauan meranti, sedangkan penelitian dahulu membahas analisis peran pemerintah dalam penanggulangan kerusakan hutan dan lahan kerusakan hutan banyak aspek yang menyebabkannya seperti perambahan maupun kebakaran, Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam upaya Penanggulangan bencana banjir di kota Medan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 . Pandangan Islam Tentang Larangan Membakar Hutan dan Lahan (Merusak Lingkungan Hidup).

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi untuk dijadikan khalifah yang senantiasa menjaga, merawat dan mengatur bumi, sebagaimana firman dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 :

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." [QS. Al-Baqarah : 30]

Didalam ayat diatas dijelaskan bahwasannya allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini untuk dijadikan khalifa atau pemimpin atas apa-apa yang ada dipermukaan bumi untuk selalu menjaga dan mengatur, akan tetapi manusia itu sendiri membuat kezholiman dan membuat kerusakan dimuka bumi yang mengakibatkan bencana bagi manusia itu sendiri.

Yang menyebabkan bencana tersebut yaitu ulah tangan manusia itu sendiri, kerusakan yang disebabkan manusia yaitu penebangan hutan secara ilegal, membakar hutan dan lain-lain, Allah SWT berfirman :

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) [QS. Ar-Ruum : 41]

Didalam penjelasan ayat diatas bahwasannya kerusakan yang terjadi didarat dan dilaut di sebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri dan yang merasakan akibatnya manusia itu juga sendiri.

Dan Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran tentang larangan membuat Kerusakan-kerusakan di muka bumi :

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik [QS.Al-A’raaf : 56].

Pemahaman dari pedekatan yang telah peneliti jabarkan diatas adalah bahwa sesungguhnya bencana yang datang tidak lain adalah karena ulah tangan manusia itu sendiri, baik itu manusia yang membakar hutan dan lahan maupun manusia yang membuat kebijakan tentang itu. Namun terlepas dari itu semua kita selaku masyarakat mesti mengawal dan mengiringi juga dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan pimpinan kita, jika ada yang melenceng kita mesti meluruskan.

2.9 Defenisi Konsep

Defenisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana di tulis batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya, antara lain :

1. Partisipasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Menurut Singarimbun (1995:46) konsep operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel definisi operasional berisi tentang indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel.2.1 : Konsep Operasional Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kebakaran hutan dan Lahan. (Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P. 2/IV-SET/2014)	1. Pencegahaan	a. Memberikan Informasi b. Patroli/Pengawasan c. Konsultasi
	2. Pemadaman	a. Bertindak Bersama b. Kejadian kebakaran (Koordinasi)
	3. Penanganan Pasca Kebakaran	a. Monitoring b. Evaluasi

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P. 2/IV-SET/2014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

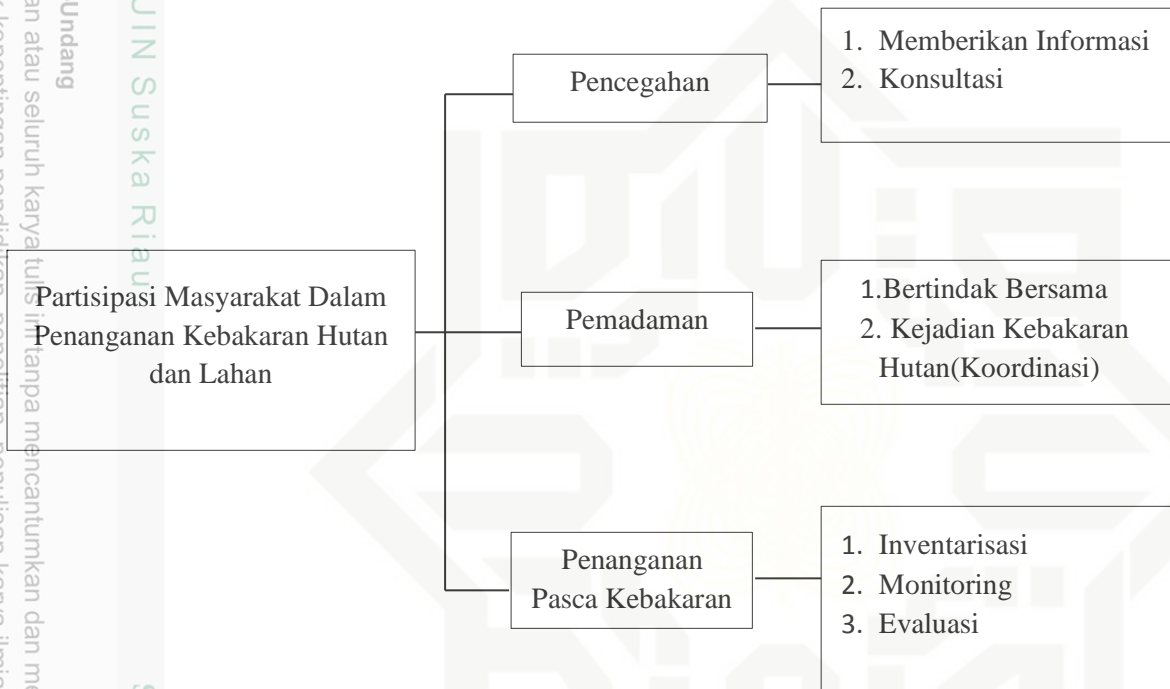
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Kerangka Pemikiran

Gambar. 2.2 : Kerangka Pemikiran Penelitian

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Nomor : P. 2/IV-SET/2014